



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006





RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK 2006**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	I.1
a. Visi Kota Depok.....	I.2
b. Misi Kota Depok.....	I.3
c. Kondisi Umum.....	I.4
1.2 Maksud dan Tujuan	I.6
a. Maksud.....	I.6
b. Tujuan.....	I.7
1.3 Landasan Hukum	I.8
1.4 Sistematika Penyusunan RKPD	I.9
BAB II. RANCANGAN KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH	
2.1 Evaluasi Kinerja	II.1
2.2 Kerangka Ekonomi Daerah	II.9
BAB III. KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2006	
3.1 Isu Strategis Kota Depok	III.1
3.2 Agenda Pembangunan Tahun 2006	III.4
3.3 Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas	III.6
A. Bidang Administrasi Umum Pemerintah	III.6
B. Bidang Pertanian.....	III.11
C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.....	III.12
D. Bidang Koperasi.....	III.13
E. Bidang Ketenaga Kerjaan.....	III.14
F. Bidang Kesehatan.....	III.15
G. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	III.16
H. Bidang Penataan Ruang.....	III.17

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK 2006*

I. Bidang Permukiman.....	III.18
J. Bidang Pekerjaan Umum.....	III.19
K. Bidang Perhubungan.....	III.19
L. Bidang Kepariwisata.....	III.20
M. Bidang Lingkungan Hidup.....	III.20
N. Bidang Kependudukan.....	III.21
3.4 Kebijakan Anggaran.....	III.22
3.4.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan.....	III.23
3.4.2 Kebijakan Anggaran Belanja.....	III.24
3.4.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan.....	III.25
BAB IV. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	
Program Kegiatan Tahun 2006.....	IV.3
BAB V. KAIDAH PELAKSANAAN.....	V.1
BAB VI. PENUTUP.....	VI.1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK 2006**

**BAB II
RANCANGAN KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH**

2.1 Evaluasi Program

Renstra Strategis (renstra) Kota Depok Tahun 2002-2006 merupakan dokumen perencanaan strategis-taktis yang telah menetapkan 23 program strategis dengan 37 indikator kinerja sebagai acuan target minimal pencapaian kinerja tahunan Kota Depok. Evaluasi program pembangunan Kota Depok berdasarkan Renstra Tahun 2004 telah menunjukkan hasil yang sangat mengembirakan, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian 36 indikator kinerja yang rata-rata pencapaiannya diatas 100 % terkecuali program peningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelesaian masalah pertanahan baru tercapai 3 dari 12 target kinerja, serta program pendidikan luar sekolah melalui kegiatan pelatihan angka melek huruf baru mencapai 240 orang dari target 300 orang. Adapun realisasi pencapaian target kinerja renstra Tahun 2004 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II-1. Pencapaian Kinerja Renstra Kota Depok Tahun 2004

NO.	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2004	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	9	10
1	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	- Tersalurkannya bantuan Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Tempat Ibadah	50	431
		- Terbinanya kader Penyuluhan Keagamaan	Orang	60	126
2	Pembangunan,Perbaikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Berkurangnya titik Rawan Kemacetan	Titik	2	2
		- Terlayannya PJU	Titik	200	373
3	Pembangunan, Perbaikan Peningkatan Srana dan Prasarana Sumber Daya Air	- Berkurangnya lokasi Banjir	Lokasi	1	1
		- Pemenuhan kebutuhan Pemakaian air Irigasi	Daerah	1	1
4	Peningkatan Pendidikan Dasar dan Menengah	- Terlaksananya rehabilitasi atau Pembangunan Gedung Sekolah	Unit	120	126
		- Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dilatih	Orang	100	1351
		- Penuntasan WAJAR DIKNAS	%	92	92

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

NO.	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2004	
				Rencana	Realisasi
5	Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah	- Jumlah (Tambahan) masyarakat yang melek Huruf	Orang	300	240
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	- Tertatanya kawasan Kumuh	Kawasan	3	3
		- Berkurangnya lokasi Banjir di lingkungan Permukiman	Lokasi	5	5
		- Teranglutnya sampah	%	41	42
		- Layanan Prasarana Air Bersih	%	16,1	16,8
7	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	- Meningkatnya penataan Pasar	Unit	1	1
8	Pemberdayaan Usaha	Terlatihnya pengelolaan Usaha Kecil, menengah dan Koperasi	Orang	60	70
9	Peningkatan Pelayanan	- Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66	71,96
10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	- Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	60	60
		- Terbinanya Hubungan Industrial antara pengusaha dan Pekerja	Perusahaan	30	30
11	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	- Terbinanya kelembagaan Swadaya Masyarakat	Orang	120	518
12	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	- Menurunnya angka Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	%	5	12,48
13	Peningkatan Prestasi	- Terbinanya atlet yang Berprestasi	Atlet	30	265
		- Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga	Kegiatan	4	10
14	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota	- Jumlah Aparatur Pemerintah Kota yang mengikuti diklat	Orang	140	490
		- Meningkatnya Penerimaan PAD	%	5	25,70
		- Meningkatnya Kapasitas Perencanaan	Dokumen	5	9
		- Meningkatnya kualitas Pengawasan	% Tindak Lanjut	30	83,14
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Berkurangnya Ketidak- puasan Masyarakat	Pengaduan	180	185
		- Jumlah penyelesaian masalah pertanahan	Masalah	12	3
16	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	- Meningkatnya tindakan Penegakan Perda	%	10	13
17	Peningkatan Administrasi Kependudukan	- Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan	%	64	64
18	Pengembangan Pertanian Perkotaan	- Berkembangnya komoditi Unggulan	Jenis	1	1
19	Pengembangan Industri Rumah Tagga, Kecil dan Manengah	- Terlatihnya pengusaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	Orang	60	60
20	Penataan dan Pengembangan Tata Ruang Kota	- Tersusunya RTR BWK	Kawasan	2	3
21	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Menurunnya jumlah situ Yang tercemar	Situ	1	1
22	Penataan dan Pengembangan Pariwisata	- Terpetakannya potensi Wisata	Lokasi	1	1
23	Peningkatan Investasi Daerah	- Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	%	5,77	6,35

Berdasarkan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra Tahun 2004 dari masing-masing program strategis, terlihat bahwa target kinerja umumnya dapat dipenuhi dan hasil evaluasi pencapaiannya yang dikelompokkan menurut bidang pembangunan, adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

a. Kinerja Kelompok Program Strategis di Bidang Pendidikan

Target Renstra Kota Depok Tahun 2004 pada Program Pendidikan Dasar dan Menengah telah dapat melaksanakan rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah sebanyak 126 unit dari target 120 unit sekolah, serta melaksanakan pelatihan terhadap 351 tenaga kependidikan dan guru dari 100 orang yang ditargetkan, serta penuntasan program WAJAR DIKDAS sesuai target sebesar 92 %. Sedangkan program pendidikan luar sekolah melalui target jumlah masyarakat yang melek huruf 300 orang baru dapat direalisasikan 240 orang hal ini disebabkan minat masyarakat yang terdata untuk mengikuti pelatihan.

Walaupun secara umum target Renstra bidang pendidikan telah dapat dipenuhi, namun secara kualitas masih dirasakan rendah dalam memenuhi kompetensi peserta didik, hal ini antara lain disebabkan keterbatasan pendidik baik secara kualitas dan kuantitas, fasilitas belajar yang masih terbatas serta biaya operasional proses belajar mengajar yang belum seluruhnya dapat dipenuhi pemerintah.

b. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Kesehatan

Kinerja kelompok program strategis bidang kesehatan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan menunjukkan naiknya Angka Harapan Hidup (AHH) setiap tahunnya, dan berdasarkan target AHH Tahun 2004 sebesar 66 tahun dapat dicapai menjadi 71,96 tahun, artinya kualitas hidup masyarakat terus meningkat dengan semakin baiknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya jaringan pelayanan kesehatan pemerintah melalui Puskesmas sebanyak 27 buah di 6 Kecamatan, 7 puskesmas pembantu dan 838 posyandu. Disamping itu peran pihak swasta terhadap pelayanan kesehatan juga cukup banyak, dan Pemerintah Kota Depok juga sedang mempersiapkan pembangunan RSUD sebagai rujukan pelayanan kesehatan di Kota Depok.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

c. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Ekonomi.

Di Bidang Ekonomi, program-program strategis seperti Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah telah melaksanakan pelatihan pada para pengusaha dalam kelompok ini sebanyak 60 pengusaha dari target 60 pengusaha; Penataan Pasar Tradisional terus diupayakan dan dapat direalisasikan sebanyak 1 unit pasar dari 1 unit yang direncanakan; kemudian, Program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi telah dapat melatih 70 orang dari 60 orang yang ditargetkan khususnya dalam materi pengelolaan usaha kecil, menengah dan koperasi; Begitu pula dengan Program Perluasan Kesempatan Kerja telah melaksanakan berbagai pelatihan serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang berada di Kota Depok; untuk Program Peningkatan Investasi di Kota Depok selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini telah memberikan gambaran meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang cukup signifikan, angka statistik menunjukkan LPE Kota Depok tahun perhitungan terakhir Tahun 2003 sebesar 6,35 %.

Dibidang pertanian sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat, upaya-upaya yang perlu terus didorong adalah dalam program pengembangan pertanian perkotaan, khususnya pengembangan komoditi unggulan, dimana pada Tahun 2004 dapat direalisasikan 1 jenis komoditi unggulan sesuai target. Untuk itu upaya pengembangan komoditi unggulan diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi Kota Depok.

d. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Sosial Budaya

Di Bidang Sosial Budaya, Program peningkatan kesejahteraan sosial telah menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2004 dari target dari 5 % dapat diturunkan menjadi 12,48 %.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama telah tersalurkan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan kepada 431 tempat peribadatan dari 50 tempat peribadatan yang ditargetkan. Demikian pula halnya dengan pembinaan kader penyuluh keagamaan, pada kurun waktu tersebut telah dilaksanakan penyuluhan pada 126 kader dari target sebesar 60 orang kader.

Pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya dalam penegakan Perda telah tercapai kondisi yang makin membaik; kemudian dalam upaya peningkatan prestasi olah raga melalui Program Peningkatan Prestasi Olah raga, telah dilaksanakan pembinaan kepada 90 atlet berprestasi dari target sebanyak 30 orang atlet, adapun jumlah penyelenggaraan kompetisi olah raga, telah terselenggara 10 kegiatan dari target 4 kegiatan.

e. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan memerlukan kapasitas yang memadai, baik dari sisi kapasitas aparatur, kemampuan keuangan daerah serta perbaikan mekanisme birokrasi guna mencapai tata pemerintahan yang baik. Untuk hal tersebut, Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota mendapat perhatian khusus dalam Renstra Kota Depok. Pada Tahun 2004 sejumlah 490 aparatur kota telah mengikuti diklat di berbagai jenjang dan bidang yang diperlukan dari 140 orang yang ditargetkan.

Di sisi Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, pada Tahun 2004 PAD Kota Depok ditargetkan sebesar 5 % dapat direalisasikan 25,70 % atau mencapai Rp.54.467.013.636,77 dan pada Tahun 2005 realisasi penerimaan PAD diharapkan mencapai Rp.60.575.881.533,00, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Kota Depok masih berkisar antara 14 %. Sedangkan dari sisi kualitas pengawasan dari 30 % rencana tindak lanjut dapat direalisasikan 83,14 % tindak lanjut. Hal ini menunjukkan akan semakin membaiknya kualitas pembangunan sejalan dengan meningkatnya penerimaan daerah dan berjalannya mekanisme pengawasan.

f. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Lingkungan dan Pelayanan Publik

Program-program strategis lainnya yang mendapat perhatian khusus dalam Renstra Kota Depok adalah program-program pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik. Dibidang pengelolaan lingkungan Pemerintah Kota Depok dengan DPRD telah berhasil menyusun Perda Kota Depok Nomor. 12 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2000-2010 sebagai payung aktivitas pembangunan dalam penataan dan pemanfaatan ruang kota. Sebagai penjabaran dari Perda tersebut telah disusun dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Bagian Wilayah Kota (BWK), serta pada Tahun 2004 direalisasikan 3 RTR BWK dari target 2 kawasan, dan pada Tahun 2005 diharapkan dapat direalisasikan evaluasi dan revisi RTRW Tahun 2000-2010 serta penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Di bidang lingkungan hidup, Program strategi dalam Renstra yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya berhubungan dengan upaya penurunan jumlah situ yang tercemar telah dapat direalisasikan 1 situ sesuai target. Namun untuk memacu penataan lingkungan tersebut dalam tiga tahun terakhir Pemerintah Kota Depok bersama Pemerintah Pusat melakukan kerjasama dengan Bank Dunia untuk program jangka panjang sedangkan mempersiapkan program pengelolaan lingkungan perkotaan secara menyeluruh (*Overall Urban Environmental Management*), yang diantaranya menyangkut pengelolaan persampahan, drainase kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

serta normalisasi situ-situ yang jumlahnya cukup signifikan bagi perbaikan Tata Air di wilayah Jabodetabek.

Di bidang pelayanan publik, Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperbaiki mekanisme pelayanan publik, untuk memenuhi target Renstra Tahun 2004 yaitu berkurang ketidakpuasan masyarakat, dapat diselesaikan 185 pengaduan pelayanan publik. Namun pada layanan masalah pertanahan yang sangat kompleks dari target 12 masalah baru dapat direalisasikan 3 masalah sebagai akibat tidak tercapainya kesepakatan harga maupun keterbatasan dana pemerintah. Walaupun masih banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan tetapi upaya keras Pemerintah Kota dalam meningkatkan pelayanan telah mendapat apresiasi pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan ditetapkannya Unit Pelayanan IMB Kota Depok sebagai Unit Pelayanan Percontohan Madya Citra Pelayanan Prima Provinsi Jawa Barat Tahun 2004.

Di Bidang Kesejahteraan Rakyat, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2003. Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Depok menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini ditunjukkan dengan Indikator Kesejahteraan Rakyat yang meningkatkan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,13 (2003) diatas rata-rata IPM Jawa Barat 65,8 dengan indikator penunjangnya berdasarkan perhitungan akhir Tahun 2003; Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 71,96 Tahun, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,8 tahun, Daya Beli (*Purchasing power parity*) sebesar 575,85 dan Angka Melek Hurup sebesar 96,90 %.

Indikator lainnya yang menunjukkan hasil positif adalah menurunnya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*), Angka Kematian Bayi, dan Angka Kesakitan akibat demam berdarah dan diare. Gini rasio yang menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan dari 40 % masyarakat yang berpenghasilan rendah, memperlihatkan angka pendapatan masyarakat relatif merata, atau tidak terjadi ketimpangan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Untuk indikator Pola Konsumsi, relatif tidak berubah yaitu konsumsi makanan masih lebih tinggi dibanding konsumsi non-makanan. Menurut literatur tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non-makanan melebihi 60 %. Capaian Indikator Pola Konsumsi masyarakat Depok untuk golongan non-makanan sudah mencapai 45,13 %, hal diakibatkan daya beli yang belum signifikan peningkatannya karena pemulihan/pertumbuhan ekonomi yang masih tersendat. Namun demikian Pengeluaran masyarakat rata-rata per bulan saat ini mencapai Rp.330.332, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp.229.653,-

Hal yang masih memprihatinkan adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang belum mampu diturunkan. Mengingat kompleksnya persoalan ini bukan hanya pada peran pemerintah tetapi juga peran swasta perlu digalakkan untuk bersama pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran ini. Adapun rincian pencapaian Indikator Kesejahteraan Rakyat dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II-2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2003

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2003
1	IPM		76,13
	• Angka Harapan Hidup	Tahun	71,96
	• Angka Melek Huruf	%	96,90
	• Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,8
	• Daya Beli		575,85
2	KEPENDUDUKAN		
	• Jumlah Penduduk	Jiwa	1.312.836,00
	• Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,37
	• Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	6.342
	• Angka Kelahiran Total		1,85

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK 2006**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2003
3	KESEHATAN		
	• Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	%	33,38
	• Angka Kesakitan		
	▪ Demam Berdarah	Penderita/ 10.000	945
▪ Diare	Penderita /1.000	15.353	
▪ TBC	Penderita	12	
4	KETENAGAKERJAAN		
	• Angkatan Kerja	Jiwa	545.735
	▪ Bekerja	Jiwa	459.532
	▪ Mencari Pekerjaan	Jiwa	86.203
	• Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	532.663
• Tingkat Pengangguran	Jiwa	7,99	
5	EKONOMI		
	• Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,35
	• PDRB atas dasar harga berlaku	Juta Rp.	5.554.257,99
	• PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku	Rp	4.307.967,35
• Gini Ratio		0,28	
6	POLA KONSUMSI		
	• Rata-rata Pengeluaran Bulanan / Kapita	Rp.	366,292
	• Pengeluaran Untuk Golongan Makanan	%	44,24
• Pengeluaran Untuk Golongan Bukan Makanan	%	55,76	
7	KEMISKINAN		
	• Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	65,0
	• Persen Penduduk Miskin	%	4,96

2.2 Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 memberikan gambaran perkiraan ekonomi makro Kota Depok Tahun 2006 yang dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Depok.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Sejalan dengan pernyataan visi Kota Depok sebagai Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa maka upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana kota serta kapasitas pemerintahan menjadi sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Kota Depok Tahun 2002-2006, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2006 ditargetkan pada angka pertumbuhan 6,54 %. Dengan demikian PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 diperkirakan akan mencapai Rp. 1.855,29 Milyar. Sementara Inflasi Tahun 2006 diperkirakan akan berada pada 7 % dan diharapkan tingkat pengangguran akan berkisar sebesar 7,28% dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 1.406.523 jiwa. Berikut ini disajikan Tabel mengenai perkiraan ekonomi dan sosial makro Kota Depok.

Tabel II-3. Perkiraan Ekonomi dan Sosial Makro Kota Depok

NO	INDIKATOR	PERKIRAAN TAHUN 2006
1	PDRB	
	- Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	1.776.835,76
2	Inflasi	7,00
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) **	6,54
4	IPM *	79,22
5	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.406.523
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,74
7	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM)	7.022
8	Total Fertility Rate (Jiwa)	1,58
9	Angkatan Kerja	726.126
	- Bekerja	562.457
	- Mencari Kerja	163.669
10	Bukan Angkatan Kerja	600.157
11	Tingkat Pengangguran (%)	7,28

Sumber : Hasil Analisis Bapeda Kota Depok, 2005

* Data Olahan BPS Kota Depok

** Renstra Kota Depok Th. 2002-2006

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

BAB III KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2006

3.1 ISU STRATEGIS KOTA DEPOK

Pembangunan Kota Depok yang berlangsung selama periode 1999-2004, selain telah menghasilkan banyak kemajuan, juga masih menyisakan berbagai permasalahan yang senantiasa menjadi isu-isu strategis terkait dengan pembangunan perkotaan.

Sebagai Kota yang berdampingan dengan Pusat Pemerintahan, DKI Jakarta, Depok senantiasa dipengaruhi oleh pasang-surut lingkungan strategis bangsa. Berbagai permasalahan perkotaan yang terjadi di Pusat Pemerintahan, langsung maupun tidak langsung, berdampak kepada Kota Depok. Kondisi ini menyebabkan permasalahan Kota Depok, yang penduduknya lebih dari 50% beraktivitas di Jakarta, menjadi lebih kompleks.

Kompleksitas permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi pada lingkungan eksternal kota, bersenyawa dengan berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan internal kota. Perpaduan kedua permasalahan dan kondisi dari kedua lingkungan strategis ini, menjadi satu kesatuan isu strategis yang dinamis.

Isu-isu strategis yang berkembang selama ini diperkirakan masih menjadi tantangan utama pembangunan Kota Depok di Tahun 2006 dapat dikategorikan menjadi 3 isu strategis utama:

1 Kesejahteraan

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Depok, merupakan konsekuensi letak geografis Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, sehingga tingginya tuntutan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan, sementara kemampuan Pemerintah Kota Depok belum dapat disejajarkan dengan Pemerintah DKI yang telah mapan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, beberapa permasalahan tersebut antara lain :

- (1) *Lapangan kerja.* Dari 545.735 angkatan kerja yang ada pada Tahun 2003, sebanyak 86.203 orang yang belum mendapatkan kesempatan kerja, atau sebesar 15,8 % dari total angkatan kerja atau 6,7 % dari total penduduk Kota Depok.
- (2) *Kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah.* Hal ini ditunjukkan oleh data prosentase penduduk miskin meningkat rata-rata 1,73 % dari Tahun 2000 sebesar 37.300 jiwa menjadi lebih dari 65.000 jiwa pada Tahun 2003. Kesenjangan pendapatan diperlihatkan dengan meningkatnya gini rasio (pemerataan pendapatan masyarakat) dari 0,152 (2001/2002) menjadi 0,281 (2003) atau terjadi penurunan.
- (3) *Masih rendahnya kesempatan atau akses masyarakat miskin,* terutama terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase buta huruf pada penduduk miskin sebesar 3,1% dari penduduk Kota Depok, demikian pula data angka kematian bayi sebesar 42,65 per 1.000 kelahiran hidup terjadi dalam kelompok masyarakat miskin.

2 Sarana dan Prasarana Perkotaan

Sarana dan prasarana dasar perkotaan seperti jalan dan jembatan, drainase dan pengendalian banjir, air bersih dan persampahan modal dasar pertumbuhan ekonomi. karena pembangunan sarana dan prasarana dasar, dapat meningkatkan produktivitas sektor produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas utama, antara lain :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- (1) *Jalan dan Jembatan.* Keterbatasan jalan dan jembatan ditambah dengan tingkat kerusakan jalan akibat beban kendaraan yang melampaui kapasitas jalan, dan sistem drainase jalan yang belum memadai berakibat terhadap kemacetan masif di berbagai ruas jalan.
- (2) *Penyediaan Air Minum.* Terjadinya Stagnasi dalam peningkatan pelayanan air minum perpipaan selama 5 tahun pertama, tetapi melalui KPS Air Bersih tingkat pelayanan air bersih perkotaan secara bertahap mulai dapat ditangani, disamping kerjasama pengelolaan air minum dengan Kabupaten Bogor sampai terselesaikannya seluruh penyerahan aset, sehingga nantinya target pelayanan air bersih perkotaan dapat ditangani. Tingkat pelayanan air bersih sampai dengan Tahun 2004 masih kurang dari 20% penduduk kota.
- (3) *Drainase dan Pengendalian Banjir.* Keterbatasan saluran drainase dan sistem pengendali banjir yang komprehensif, telah menyebabkan berbagai genangan dan banjir di beberapa bagian wilayah kota, hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dengan membuang sampah pada saluran air dan sungai.
- (4) *Persampahan.* Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk berdampak terhadap produksi sampah, disisi lain terbatasnya lahan pengelolaan sampah yang dimiliki pemerintah kota baik pada pembuangan sampah sementara maupun pembuangan akhir. Menjadikan masalah sampah menjadi isu lingkungan yang sangat krusial. Kemampuan pemerintah Kota dalam penanganan persampahan ini baru mencapai 40 % dari total sampah yang dihasilkan warga kota, berarti 60 % merupakan sampah yang belum dapat ditangani dan dapat menjadi masalah lingkungan utama bagi Kota Depok.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- (5) *Perumahan Kumuh*. Luasan kawasan kumuh cenderung terus meningkat setiap tahunnya selaras dengan pertumbuhan penduduk dan makin meningkatnya kegiatan ekonomi kota. Hal ini dampak positif dari kemajuan kota, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif dengan meningkatnya arus migrasi dan perluasan kawasan kumuh. Dimana jumlah kawasan kumuh yang tersebar di beberapa bagian kota mencapai 13 lokasi, yang diharapkan melalui berbagai program pembangunan berikutnya dapat mengatasi dampak negatif dari kemajuan kota.

3 Kapasitas Pemerintahan Daerah

Belum sempurnanya pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh perbedaan persepsi para pelaku, baik ditingkat pusat dan daerah serta lahirnya berbagai produk hukum yang mengatur masalah otonomi yang tidak disertai dengan instrumen operasionalnya dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Masalah kapasitas pemerintahan kota masih sangat terbatas ditandai dengan :

- (1) terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas;
- (2) terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembangunan.
- (3) belum optimalnya sistem dan kelembagaan yang efektif;
- (4) belum terbangunnya sistem tata pemerintahan yang baik, demi terwujudnya kerangka dasar pembangunan yang berkelanjutan.

3.2 AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Guna menjawab dinamika dan tuntutan kebutuhan masyarakat maka agenda pembangunan Kota Depok Tahun 2006 berorientasi pada hal-hal sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Pertama, pencapaian 23 program Strategis dengan 37 indikator kinerja pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis Kota Depok Tahun 2002-2006;

Kedua, upaya pemaduserasian dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat terutama dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Jawa Barat 2010 sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Jawa Barat.

Ketiga, upaya penyelesaian berbagai isu-isu strategis yang merupakan permasalahan tahunan Kota Depok Tahun 2005 dan akan menjadi *trend* pada Tahun 2006 yang memerlukan penanganan segera.

Untuk mewujudkan agenda pembangunan tersebut diperlukan kebijakan sebagai dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Komponen yang terdapat dalam APBD adalah Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Belanja daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan diharapkan mampu menutupi keperluan belanja tersebut. Sedangkan pembiayaan dilakukan apabila terjadi defisit atau surplus anggaran.

Dengan demikian anggaran berfungsi mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk jangka satu tahun. Fungsi anggaran di lingkungan pemerintahan mempunyai pengaruh penting dalam akutansi dan pelaporan keuangan, hal tersebut disebabkan karena :

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan politik;
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diinginkan;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah;
5. Hasil pelaksanaan anggaran harus dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan dalam pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

3.3 KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI PRIORITAS

Sebagaimana Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, maka Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas Pembangunan Tahun 2006 disusun menurut bidang kewenangan sebagai berikut :

A. BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN

1 Aparatur Daerah dan Pemerintahan Umum

Kebijakan Umum

- o Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kota;
- o Peningkatan Manajemen pelayanan publik;

Strategi Prioritas

- o Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Aparatur, baik diklat struktural, fungsional maupun yang bersifat substantif dengan melatih minimal 170 peserta Diklat ;
- o Melaksanakan pembinaan pada aparatur kecamatan dan kelurahan;
- o Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana/prasarana Pemerintahan;
- o Meningkatkan penyelesaian masalah pertanahan pada tingkat pencapaian 12 masalah tertangani;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- Melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa;
- Meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien;
- Melaksanakan pengembangan/pemekaran pemerintah kecamatan;
- Mengembangkan konsep dan melaksanakan evaluasi kinerja pemerintahan;
- Melaksanakan penataan kewenangan pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik pada tingkat pencapaian maksimal 140 pengaduan;
- Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi hubungan kerja eksekutif dan legislatif
- Mengembangkan penataan arsip daerah, perpustakaan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi menuju E-Government

2 Keuangan Daerah

Kebijakan Umum

- Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah

Strategi Prioritas

- Meningkatkan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat pencapaian 5% dibandingkan tahun sebelumnya;
- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Keuangan daerah.

3 Pembangunan

Kebijakan Umum

- Peningkatan kapasitas perencanaan dan kualitas pembangunan;

Strategi Prioritas

- Mengefektifkan pengendalian pembangunan secara transparans dan akuntabel sesuai target kinerja;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik terhadap program dan kegiatan secara partisipatif;
- Menyusun dokumen perencanaan daerah minimal 5 (lima) dokumen;
- Melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat;
- Meningkatkan ketersediaan data dan indikator makro pembangunan;
- Meningkatkan tertib administrasi pembangunan;

4 Keagamaan

Kebijakan Umum

- Peningkatan pelayanan keagamaan;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Strategi Prioritas

- o Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan pada tingkat pencapaian minimal 50 tempat ibadah;
- o Melaksanakan pembinaan kader penyuluh keagamaan pada tingkat pencapaian 60 orang;
- o Meningkatkan pembinaan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama;

5 Hukum dan Ketertiban

Kebijakan Umum

- o Peningkatan pembentukan produk hukum, sosialisasi dan penegakan hukum;
- o Peningkatan kualitas pelayanan hukum dan perundang-undangan.

Strategi Prioritas

- o Melaksanakan pembentukan dan penegakan produk hukum daerah pada tingkat pencapaian 10%;
- o Melaksanakan evaluasi produk-produk hukum daerah dan menerbitkan produk hukum perubahan dan penyempurnaannya;
- o Mengembangkan kesadaran dan penerapan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

6 Pengawasan

Kebijakan Umum

- o Peningkatan mutu pengawasan;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Strategi Prioritas

- Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan ;
- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Kerja berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan taat peraturan;
- Meningkatkan tindak lanjut/pemutakhiran temuan pada tingkat pencapaian 40%.

7 Kesatuan Bangsa

Kebijakan Umum

- Pembinaan kesatuan bangsa yang berbasis nilai- nilai HAM dan demokratisasi;
- Peningkatan kehidupan demokrasi;

Strategi Prioritas

- Melaksanakan penanaman nilai-nilai HAM dan Demokratisasi terhadap 7 pilar penegakan HAM di daerah;
- Melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa untuk meningkatkan ketahanan sosial;
- Meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi politik;

8 Pemberdayaan

Kebijakan Umum

- Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Strategi Prioritas

- Meningkatkan pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat melalui pembinaan keswadayaan dengan tingkat pencapaian minimal 120 orang terbina;
- Melaksanakan advokasi gender;
- Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga miskin/pra sejahtera ;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Meningkatkan penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan;
- Mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas keluarga berencana.

B. BIDANG PERTANIAN

Kebijakan Umum

- Peningkatan produktivitas pertanian;
- Pengembangan pemasaran produk pertanian;

Strategi Prioritas

- Mengembangkan potensi unggulan pertanian pada tingkat pencapaian 1 (satu) produk unggulan;
- Meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
- Meningkatkan diversifikasi usaha pertanian yang berorientasi pasar;
- Meningkatkan peran kelembagaan kelompok tani;
- Meningkatkan jaringan informasi pemasaran produk pertanian;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- Memberantas dan mengendalikan penyakit hewan menular dan kesehatan masyarakat veteriner;
- Meningkatkan pelayanan pemotongan hewan ;

C. BIDANG *PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN (termasuk BIDANG PENANAMAN MODAL)*

1. Industri

Kebijakan Umum

- Peningkatan produktivitas Industri rumah tangga, kecil dan menengah

Strategi Prioritas

- Meningkatkan kualitas pelaku usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah pada tingkat pencapaian 60 orang terlatih;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana industri rumah tangga, kecil dan menengah;
- Mengembangkan industri pengolahan skala kecil dan menengah;
- Mengendalikan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (Aper) serta sumber energi lainnya.

2. Perdagangan

Kebijakan Umum

- Peningkatan kegiatan usaha perdagangan dan jasa;
- Peningkatan perlindungan konsumen.

Strategi Prioritas

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor perdagangan;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- Menata pusat kegiatan usaha perdagangan minimal 1 (satu) unit pasar tradisional;
- Meningkatkan layanan dan jaminan mutu produk;
- Melaksanakan pengendalian ketersediaan kebutuhan pokok dan stabilitas harga;

3. Penanaman Modal

Kebijakan Umum

- Pengembangan investasi berbasis tenaga kerja;

Strategi Prioritas

- Menata sistim regulasi dan pelayanan perijinan;
- Mengembangkan jaringan dan sistim informasi pasar;
- Meningkatkan Fasilitas akses permodalan;
- Mengembangkan kerjasama kemitraan;

D. BIDANG KOPERASI

Kebijakan Umum

- Peningkatan produktifitas pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
- Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi dan UKM.

Strategi Prioritas

- Melakukan Penguatan kelembagaan koperasi dan UKM;
- Menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi pada tingkat pencapaian 60 orang terlatih;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- Memberikan bantuan teknis dan akses permodalan bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
- Melakukan kerjasama kemitraan antara koperasi dengan usaha menengah dan besar;

E. BIDANG KETENAGA KERJAAN (termasuk BIDANG SOSIAL)

1 Ketenaga Kerjaan

Kebijakan Umum

- Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pasar kerja;
- Penanggulangan Pengangguran.

Strategi Prioritas

- Meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta kerjasama dengan Balai Latihan Kerja;
- meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang responsif gender;
- Melaksanakan sertifikasi ketenaga kerjaan;
- Meningkatkan pembinaan hubungan industrial antara pengusaha, pekerja dan pemerintah kota pada tingkat pencapaian 30 perusahaan terbina;
- Mengembangkan basis data ketenaga kerjaan;
- Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi para pekerja pada tingkat pencapaian 60 orang terlatih;
- Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja dan pengawasan tenaga kerja asing.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

2 Sosial

Kebijakan Umum

- Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Peningkatan semangat kepeloporan serta kejuangan masyarakat dan generasi muda.

Strategi Prioritas

- Menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tingkat pencapaian minimal 5% dibandingkan tahun sebelumnya;
- Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- Meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial;
- Mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

F. BIDANG KESEHATAN

Kebijakan Umum

- Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) ;

Strategi Prioritas

- Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi keluarga miskin (pengobatan, KIA/KB, Gizi, P2P, Kesling) dan rujukan;
- Meningkatkan sarana/prasarana dan pemberdayaan kualitas sumber daya kesehatan;
- Meningkatkan promosi kesehatan dan surveilans;
- Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan;
- Meningkatkan upaya pencegahan penyakit-penyakit berbasis lingkungan;

*RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK 2006*

**G. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (termasuk BIDANG
OLAH RAGA)**

1. Pendidikan & Kebudayaan

Kebijakan Umum

- o Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
- o Peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- o Peningkatan sumberdaya pendidikan;
- o Peningkatan Efisiensi pengelolaan pendidikan;

Strategi Prioritas

- o Meningkatkan mutu lembaga pendidikan (formal dan non formal);
- o Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- o Meningkatkan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan;
- o Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah pada tingkat pencapaian 120 unit sekolah;
- o Melaksanakan peningkatan mutu sumberdaya pendidikan dan kependidikan pada tingkat pencapaian 100 orang terlatih;
- o Meningkatkan penuntasan pelaksanaan Wajar Dikdas pada tingkat pencapaian 94%;
- o Meningkatkan jumlah warga yang melek huruf sebanyak minimal 500 Orang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

2. Olah Raga

Kebijakan Umum

- o Peningkatan kualitas pembinaan olahraga ;

Strategi Prioritas

- o Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ;
- o Meningkatkan frekuensi kompetisi olahraga pada tingkat pencapaian 4 kali kompetisi;
- o Pembinaan olahraga berprestasi sejak dini dengan pendamping profesional pada tingkat pencapaian 30 atlet terbina ;

H. BIDANG PENATAAN RUANG

Kebijakan Umum

- o Penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- o Peningkatan kualitas penataan ruang
- o Pengembangan pusat pertumbuhan Alternatif pada sub-sub pusat kota.

Strategi Prioritas

- o Menerapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok hasil revisi yang berbasis pada efisiensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pertumbuhan kota (*growth management*);
- o Meningkatkan penataan ruang melalui pengembangan mekanisme dan alat pengendalian secara terpadu dan peningkatan peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- Melengkapi dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) untuk seluruh Bagian Wilayah Kota serta dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan-kawasan strategis kota;
- Memperkuat status hukum dokumen RRTR dan RTBL;
- Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan mekanisme insentif untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru;
- Memelihara dan mengembangkan ruang terbuka hijau;

I. BIDANG PERMUKIMAN

Kebijakan Umum

- Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
- Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran.

Strategi Prioritas

- Meningkatkan penataan kawasan kumuh pada tingkat pencapaian 3 (tiga) lokasi;
- Meningkatkan pelayanan prasarana air bersih pada tingkat pencapaian cakupan pelayanan 16,7 %;
- Mengurangi lokasi banjir di 5 (lima) lingkungan permukiman.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia penanggulangan kebakaran.
- Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

J. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Kebijakan Umum

- Peningkatan keseimbangan Sumber Daya Air
- Peningkatan pelayanan prasarana perhubungan

Strategi Prioritas

- Meningkatkan penataan kawasan genangan banjir dan pembangunan prasarana pengendalian banjir pada tingkat pencapaian 1 (satu) kawasan;
- Meningkatkan upaya normalisasi drainase kota;
- Melaksanakan normalisasi situ pada tingkat pencapaian 1 (satu) situ;
- Memenuhi kebutuhan irigasi pada tingkat pencapaian 1 (satu) daerah irigasi terlayani;
- Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
- Meningkatkan akses jalan yang menghubungkan antar wilayah.

K. BIDANG PERHUBUNGAN

Kebijakan Umum

- Peningkatan pelayanan transportasi;
- Peningkatan aksesibilitas transportasi;

Strategi Prioritas

- Mengembangkan manajemen transportasi lokal dan wilayah;
- Meningkatkan penanggulangan kemacetan pada pencapaian 2 (dua) titik kemacetan;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

- Mengembangkan sarana dan prasarana terminal;
- Meningkatkan jaringan transportasi yang efektif dan efisien;
- Mengendalikan sarana transportasi umum sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung kota;
- Meningkatkan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tingkat pencapaian minimal 200 titik PJU;

L. BIDANG KEPARIWISATAAN

Kebijakan Umum

- Peningkatan potensi pariwisata daerah;
- Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah.

Strategi Prioritas

- Meningkatkan pemberdayaan usaha, jasa dan sarana pariwisata;
- Meningkatkan pemberdayaan apresiasi seni dan budaya;
- Meningkatkan promosi kepariwisataan dan pelestarian seni dan budaya
- Melaksanakan indentifikasi 1 lokasi Potensi Pariwisata

M. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan Umum

- Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup;
- Pengelolaan sumber daya alam dan buatan secara efektif dan efisien

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Strategi Prioritas

- o Menata lahan-lahan kritis dan kawasan konservasi;
- o Mengembangkan manajemen pengelolaan persampahan;
- o Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah pada tingkat pencapaian minimal 47% jumlah sampah terangkut;
- o Meningkatkan kualitas standar operasional pengelolaan TPA Cipayung;
- o Mengembangkan kerjasama regional pengelolaan persampahan;
- o Meningkatkan pengendalian pencemaran limbah domestik, industri dan rumah sakit;
- o Meningkatkan pengendalian pencemaran udara dan tingkat kebisingan;
- o Mengendalikan dan melaksanakan pengawasan tingkat pencemaran air permukaan pada pencapaian minimal 1 (satu) Situ;
- o Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air bawah tanah;
- o Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;

N. BIDANG KEPENDUDUKAN

Kebijakan Umum

- o Peningkatan kualitas dan peran serta masyarakat dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil ;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Strategi Prioritas

- o Melaksanakan tertib dokumen kependudukan dan catatan sipil pada tingkat minimal pencapaian 68%;
- o Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- o Meningkatkan manajemen administrasi kependudukan dan catatan sipil;

3.4 Kebijakan Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam format pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dengan mengacu pada norma dan prinsip anggaran, yaitu :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab;
2. Disiplin Anggaran, merupakan satu-satunya instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah;
3. Keadilan anggaran atau kewajaran, yang terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

3.4.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana Perimbangan, meliputi : dana bagi hasil, pajak dan bagi hasil bukan pajak, bagi hasil pajak dari bantuan keuangan Propinsi serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kebijakan Umum pendapatan daerah Tahun 2006 adalah meningkatkan kemampuan penerimaan keuangan daerah dari semua jenis penerimaan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2006, maka strategi dan prioritas pencapaiannya dilakukan dengan hal – hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan PAD pada tingkat pencapaian 5 % dibandingkan tahun sebelumnya;
- b. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui :
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan;
 - Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
 - Peningkatan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

3.4.2. Kebijakan Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, seperti pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan penyusunannya berdasarkan standar pelayanan minimal, standar analisis belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. Untuk itu salah satu upaya pengendalian tingkat efisiensi dan efektifitas belanja dilakukan melalui upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ingin dicapai dan peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan alokasi belanja berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

a. Belanja Administrasi Umum

Kebutuhan belanja Administrasi Umum pada Tahun 2006 diprediksikan sebesar Rp. 250,983 milyar atau meningkat sekitar 8,71 % dari Tahun 2005. Belanja Administrasi Umum ini atau Belanja tidak langsung ini merupakan pengeluaran yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik), dan dapat dikategorikan menjadi belanja pegawai (gaji dan non gaji), belanja barang, perjalanan dinas dan pemeliharaan. Untuk belanja gaji diprediksikan sebesar Rp. 139,94 milyar belum termasuk rencana kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kenaikan gaji PNS sebesar 20%. Sisanya dipergunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintah Kota.

b. Belanja Operasi & Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM)

Belanja Operasi & Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM) merupakan belanja daerah yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Dalam melakukan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

prioritas kegiatannya dilakukan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok Tahun 2005. Dari hasil penajaman terhadap prioritas kegiatan Tahun 2006 diprediksikan bahwa alokasi untuk belanja ini sebesar Rp. 222,478 milyar.

3.4.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan mengindikasikan akan terjadinya defisit pendapatan untuk menanggulangi terjadinya defisit pendapatan sebagai akibat indikasi belanja yang lebih besar dari pendapatan, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit anggaran ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran sepanjang selisih kurang tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan.

Oleh sebab itu kebijakan pembiayaan akan mengupayakan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah defisit anggaran yang ada dan mendaya gunakan sumber penerimaan pembiayaan, antara lain:

- a. Sisa Lebih perhitungan Tahun Anggaran;
- b. Dana Cadangan;
- c. Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan;
- d. Pinjaman Daerah atau Penerbitan Obligasi.

Berdasarkan kebijakan anggaran APBD Tahun 2006, baik melalui kebijakan pendapatan, belanja maupun kebijakan pembiayaan, terlihat bahwa besarnya kebutuhan belanja dibandingkan dengan penerimaan pendapatan Tahun 2006, maka skenario rancangan APBD Kota Depok Tahun 2006 disusun sebagaimana tabel berikut :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK 2006**

Tabel. III-1. Skenario RAPBD Kota Depok Tahun 2006

NO	URAIAN	ANGGARAN 2005	ANGGARAN 2006	%
I	PENDAPATAN	450.656.688.563,16	472.256.188.918,00	4,79
1.1	Pendapatan Asli Daerah	53.217.077.605,20	62.064.869.755,00	16,63
1	Pajak Daerah	27.563.764.500,00	29.836.197.500,00	8,24
2	Retribusi Daerah	21.529.012.800,00	26.918.066.000,00	25,03
3	Bagian Laba Usaha Daerah	1.071.926.525,04	1.454.686.255,00	35,71
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3.052.373.780,16	3.855.920.000,00	26,33
1.2	Dana Perimbangan	389.342.610.957,96	402.094.319.163,00	3,28
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	77.980.863.007,96	81.517.730.939,00	4,54
2	Dana Alokasi Umum	239.099.000.000,00	251.053.950.000,00	5,00
3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
4	Dana Perimbangan dari Propinsi	72.262.747.950,00	69.522.638.224,00	(3,79)
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	8.097.000.000,00	8.097.000.000,00	-
1	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang	8.097.000.000,00	8.097.000.000,00	-
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Bantuan dari Pemerintah pusat	-	-	-
II	BELANJA	474.880.566.054,00	495.324.361.907,00	4,31
1	BAU	230.874.396.473,00	250.983.159.697,00	8,71
2	BOP+BM (Termasuk Bant.Keu Dibale)	215.931.911.229,00	222.478.712.210,00	3,03
3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Setda)	23.467.660.000,00	17.951.490.000,00	(23,51)
4	Belanja Tidak Tersangka	4.606.598.352,00	3.911.000.000,00	(15,10)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.223.877.490,84)	(23.068.172.989,00)	(4,77)
III	PEMBIAYAAN	24.223.877.530,84	23.068.172.989,00	(4,77)
3.1	Penerimaan Daerah	28.223.877.530,84	28.616.172.989,00	1,39
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	28.223.877.530,84	28.616.172.989,00	1,39
2	Transfer dari Dana Cadangan	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-
4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
3.2	Pengeluaran Daerah	4.000.000.000,00	5.548.000.000,00	38,70
1	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-
2	Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
3	Pembayaran Utang Jatuh Tempo	3.000.000.000,00	3.548.000.000,00	18,27
4	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan	-	-	-

Dari rancangan RAPBD 2006 tersebut terlihat bahwa kenaikan pendapatan hanya 4,79 % dari pendapatan APBD 2005, sementara belanja daerah naik sebesar 4,31 %. Dengan komposisi demikian, maka struktur rancangan RAPBD Tahun 2006 mengalami defisit sebesar Rp.23.068.172.989,00 tetapi defisit tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan yang direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

Anggaran sebesar Rp.28.616.172.989,00. Dan pada sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.5.548.000.000,00 sehingga komposisi rancangan RAPBD Tahun 2006 dalam posisi berimbang.

Sedangkan rencana alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan rancangan RAPBD Tahun 2006 sebagai berikut :

Pada sisi Pendapatan, terlihat bahwa kenaikan terbesar berasal dari PAD dengan kenaikan mencapai 16,63 %, sementara Dana Perimbangan diasumsikan naik 3,28 % dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak mengalami kenaikan.

Pada sisi Belanja Daerah, pengeluaran untuk Belanja Administrasi Umum (BAU) mengalami kenaikan terbesar, yaitu sebesar 8,71 % sebagai dampak dari penambahan jumlah pegawai sebanyak 400 orang, kenaikan Tunjangan BBM sebesar 30 % dan akses belanja pegawai sebesar 5 %. Sedangkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM) hanya mengalami kenaikan 3,03 % yang diasumsikan dapat memenuhi target prioritas penyelesaian 3 isu strategis RAPBD Tahun 2006 yaitu :

- i. *Kesejahteraan* meliputi 8 masalah utama antara lain : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengangguran, lapangan kerja, kependudukan dan keagamaan, yang termuat dalam 20 target Renstra 2006, dan dijabarkan dalam 337 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.76.042.347.900,00.
- ii. *Sarana dan Prasarana* meliputi 5 masalah utama antara lain, jalan dan jembatan, penyediaan air minum, drainase dan pengendalian banjir, persampahan dan perumahan kumuh, yang termuat dalam 10 target Renstra Tahun 2006, dan dijabarkan dalam 302 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.108.990.762.325,00.
- iii. *Kapasitas Pemerintahan Daerah* meliputi 5 masalah utama antara lain, ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, ketersediaan /

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

kemampuan anggaran, sistem dan kelembagaan yang efektif, sistem tata pemerintahan dan masalah hukum serta ketertiban, yang termuat dalam 7 target renstra Tahun 2006, dan dijabarkan dalam 160 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.37.445.601.985.

Pada Pos Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, diasumsikan sebesar Rp.17.951.490.000,00 lebih kecil (23,51 %) apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2005, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran belanja untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp. 12.250.000.000,-.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, estimasi untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2005 diproyeksikan sebesar Rp. 28.616.172.989,- atau naik sebesar 1,39%. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.5.548.000.000,00 atau naik 38,70 % yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada BPD Jabar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan PT. Pradas sebesar Rp. 1.000.000.000,00, disamping itu dilakukan pula pembayaran hutang Pemerintah Kota yang sudah jatuh tempo sebesar Rp.3.548.000.000,00 untuk pembayaran KPS Air Bersih yang merupakan sisa kontrak tahap I dan II. Tetapi pembayaran hutang ini belum termasuk rencana pekerjaan KPS Tahap III Tahun 2006 yang diprediksikan sebesar Rp. 4,67 milyar, apabila kesepakatan kontrak disetujui. Dengan demikian total kewajiban hutang pada KPS Air Bersih pada Tahun 2006 mencapai Rp. 8,22 milyar.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga mencerminkan finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya Pemerintah Kota disamping perlu melakukan pengumpulan sumberdaya dari masyarakat secara efisien melalui komponen pendapatan juga perlu mengalokasikan penggunaan sumberdaya secara responsif, efektif dan efisien ke dalam anggaran melalui komponen belanja daerah.

Pada Tahun 2006, pendapatan Kota Depok diprediksikan sebesar Rp.472.256.188.918,00. Sementara prediksi kebutuhan untuk Belanja Daerah adalah sebesar Rp.495.324.361.907,00 yang terdiri dari Belanja Belanja Administrasi Umum (Belanja Tidak Langsung) adalah sebesar Rp.250.983.159.697,- belum termasuk rencana kenaikan gaji pegawai sebesar 20% dan alokasi gaji ke 13.

Pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal (Belanja Langsung), Pemerintah Kota Depok telah menerapkan prinsip-prinsip perencanaan strategis dalam tahapan pelaksanaan pembangunan tahunan sebagaimana tertuang dalam Perda No. 16 Tahun 2002 tentang Rencana strategis Kota Depok yang memuat program-program strategis kota, sehingga prespektif pengukuran kinerja Pemerintah Kota dilihat dari tolok ukur pencapaian hasil-hasil

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut dan dilakukan melalui serangkaian tahapan Musrenbang Kota Depok.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kota Depok, secara keseluruhan program/kegiatan yang diusulkan sebanyak 858 kegiatan dengan usulan biaya sebesar Rp.429.508.552.670,-. Dengan demikian Pemerintah Kota dihadapkan pada besarnya kebutuhan dibandingkan kemampuan anggaran, untuk itu dilakukan serangkaian proses baik itu berupa survey lapangan maupun melalui penyusunan prioritas program/kegiatan. Disamping itu beberapa program/kegiatan sektoral lainnya diusulkan melalui pembiayaan dari APBD Propinsi Jawa Barat maupun melalui APBN. Direncanakan program/kegiatan Tahun 2006 akan dibiayai melalui APBD Kota Depok adalah sebesar Rp. 222.478.712.210.

Sedangkan untuk pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang KPS air bersih dan penyertaan modal Pemerintah Kota sebesar Rp.5.548.000.000,00. Berikut ini disajikan target program kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2006 disertai dengan kegiatan utama dan indikasi kegiatannya serta program/kegiatan yang diusulkan melalui pembiayaan APBD Propinsi Jawa Barat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2006 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat termasuk dunia usaha untuk wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas yang tertuang dalam bab terdahulu dalam RKPD ini.

RKPD Kota Depok Tahun 2006 disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tahapan Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, dan Murenbang tingkat Kota yang disesuaikan dengan Kebijakan Propinsi dan Nasional, guna mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan. Untuk itu semua pelaksanaan kegiatan, baik dalam "*kerangka regulasi*" maupun dalam "*kerangka anggaran*" diisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD atau antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran dan tanggungjawab berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota Tahun 2006, yaitu;

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), asyarakat dan dunia usaha wajib untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Depok Tahun 2006.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

2. Bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Depok, wajib untuk menjadikan RKPD Kota Depok Tahun 2006 sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2006.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, dan setiap SKPD perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2006 sebagai berikut :
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2006, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, dan berupa kerangka regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2006, yang merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
 - c. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2006 harus juga menguraikan kewenangan penggunaan anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah maupun tugas dekonsentrasi yang diterima dari pemerintah propinsi dan pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2006 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

4. Pemerintah daerah, dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, dengan mendapat masukan dari Renja-SKPD merumuskan matrik rencana tindak untuk setiap bidang pembangunan yang dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi dokumen RKPD Kota Depok Tahun 2006;
5. Masyarakat luas dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan. Dalam hal pendanaan pembangunan masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program pembangunan, berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Peran masyarakat juga dimungkinkan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
6. Dalam membuat Renja-SKPD satuan kerja wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*) dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
7. Setiap SKPD diakhir tahun anggaran 2006, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada Walikota secara berkala 3 (tiga) bulanan yang meliputi :
 - a. evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan;
 - b. evaluasi terhadap rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2006;
 - c. evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD tahun anggaran 2006 dan peraturan-peraturan terkait lainnya;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2006

8. Pemerintah daerah, dengan dikordinasikan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur Jawa Barat;
9. Setiap *stakeholder* wajib melaksanakan RKPD sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencapai arah kebijakan umum dan strategi prioritas pembangunan Kota Depok Tahun 2006.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Depok, dan menjadi dasar Kebijakan Umum APBD Kota Depok 2006.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG BERSUMBER DANA DARI APBD PROPINSI JAWA BARAT DAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2006**

NO	PROGRAM	USULAN KEGIATAN	LOKASI	USULAN BIAYA		KET.
				APBD PROP. (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5		7
1.	Peningkatan Pendidikan Dasar	1. Beasiswa untuk siswa yang tidak mampu tk SD/MI, SMP/MTs	Kota Depok	750,000,000	2,260,000,000	
		2. Pengembangan SMP terbuka	Kota Depok	500,000,000	750,000,000	
		3. Rehabilitasi & revitalisasi SD/MI, SMP/MTs melalui kerjasama masyarakat & swasta dengan pola imbal swadaya	Kota Depok	1,500,000,000	33,600,000,000	
		4. Penambahan ruang kelas SD/MI SMP/MTs	Kota Depok	1,500,000,000	3,400,000,000	
2.	Peningkatan Pendidikan Menengah dan Tinggi	1 Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Kota Depok	1,000,000,000	-	
3.	Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah/Non Formal dan Pendidikan Usia Dini	1. Penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional (KF) untuk pemberantasan buta aksara	Kota Depok	350,000,000	-	
		2. Penyelenggaraan paket A, B dan C	Kota Depok	350,000,000	-	
		3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Depok	250,000,000	-	

NO	PROGRAM	USULAN KEGIATAN	LOKASI	USULAN BIAYA		KET.
				APBD PROP. (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5		7
4.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Kota Depok	500,000,000	-	
		2. Peningkatan perlindungan Anak dan remaja	Kota Depok	100,000,000	-	
		3. Pengadaan Mobile Training Unit (MTU) 1 unit	Kota Depok	400,000,000	-	
5.	Sumber Daya Kesehatan	1. Rehabilitasi dan Pengembangan Puskesmas Mandiri/DTP	Kota Depok	13,000,000,000	25,825,000,000	
		2. Pembangunan RSUD Kota Depok	Kota Depok	12,500,000,000	43,200,000,000	Kebutuhan dana penyelesaian gedung A, B, dan C sebesar Rp. 50 Milyar
6.	Upaya Kesehatan	1. Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Kota Depok	500,000,000	-	
		2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Kota Depok	500,000,000	-	Penyakit DBD, TBC, Filariasis dan HIV
		3. Perbaikan Gizi Masyarakat	Kota Depok	400,000,000	-	
		4. Promosi Kesehatan	Kota Depok	300,000,000	-	

NO	PROGRAM	USULAN KEGIATAN	LOKASI	USULAN BIAYA		KET.
				APBD PROP. (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5		7
7.	Program KB	1. Ketahanan keluarga pengembangan klasifikasi kelompok BKB 0-5 tahun	Kota Depok	80,000,000	-	
		2. Pengembangan klasifikasi kelompok usaha BKB-kemas pasca BKB 0-5 tahun	Kota Depok	80,000,000	-	
8.	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Pemberian alat/obat kontrasepsi serta pelayanan KB yang berkualitas bagi keluarga sejahtera	Kota Depok	500,000,000	-	
		2. Pemberian alat/obat kontrasepsi serta pelayanan KB yang berkualitas bagi keluarga pra sejahtera	Kota Depok	400,000,000	-	
		3. Pemantapan kemampuan pengelola program kesehatan reproduksi remaja	Kota Depok	200,000,000	-	
		4. Revitalisasi manajemen operasional KB dilapangan	Kota Depok	200,000,000	-	
		5. Pemberdayaan keluarga	Kota Depok	250,000,000	-	
		6. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan	Kota Depok	400,000,000	-	

NO	PROGRAM	USULAN KEGIATAN	LOKASI	USULAN BIAYA		KET.
				APBD PROP. (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5		7
9.	Program Pengembangan Agribisnis	1. Pengembangan Produk Pertanian Unggulan	Kota Depok	1,500,000,000	-	
		2. Pengembangan Pertanian Perkotaan	Kota Depok	3,000,000,000	-	
10.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Penataan Tahura Pancoran Mas	Kec. Pancoran Mas	2,000,000,000	2,500,000,000	
11.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	1. Studi Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kota Depok	Kota Depok	350,000,000	-	
		2. Penambahan Jumlah Operasional (truk sampah 4 unit)	Kota Depok	1,200,000,000	-	
		3. Normalisasi Saluran Drainase Kota Depok	Kota Depok	1,000,000,000	16,470,000,000	
12.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	1. Perkuatan tebing dan normalisasi saluran sekunder cab. Barat dari BCA ke hilir ki-ka (lanjutan)	Kec. Pancoran Mas Kota Depok	3,500,000,000	3,500,000,000	
		2. Perkuatan tebing saluran cab. Barat	Kec. Pancoran Mas Kota Depok	1,000,000,000	1,000,000,000	
		3. Normalisasi pasangan turap saluran sekunder cab. Tengah	Kec. Pancoran Mas Kota Depok	800,000,000	-	
		4. revitalisasi dan pengerukan situ Pladen	Kec. Beji Kota Depok	1,200,000,000	1,200,000,000	

NO	PROGRAM	USULAN KEGIATAN	LOKASI	USULAN BIAYA		KET.
				APBD PROP. (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5		7
		5. Turapan tebing Jl. Tanah Baru	Kec. Beji Kota Depok	2,000,000,000	2,000,000,000	
		6. Turapan tebing Jl. Krukut / Gandul	Kec. Limo Kota Depok	5,000,000,000	5,000,000,000	
		7. Pembuatan sudetan dari situ Pengarengan ke kali Sugutamu	Kec. Sukmajaya Kota Depok	5,000,000,000	5,000,000,000	
13.	Pemantapan Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	1. Fasilitasi Manajemen Pengelolaan Air Bersih Kota Depok	Kota Depok	500,000,000	-	
		2. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Kec. Cimanggis	6,000,000,000	5,000,000,000	
		3. Prasarana Dasar Rusunawa	Kec. Cimanggis	500,000,000	850,000,000	
		4. Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih di Cinere	Kec. Limo	5,000,000,000	8,036,505,150	
		5. Penataan Sempadan Sungai di Kalibaru	Kec. Sukma Jaya	2,000,000,000	2,650,000,000	
		6. Penataan Kawasan Squatters	Kota Depok	5,000,000,000	5,150,000,000	
14.	Penataan Ruang	1. Foto Udara & Peta Digital Kota Depok	Kota Depok	1,300,000,000	-	
		2. Pengembangan Aplikasi GIS	Kota Depok	1,500,000,000	-	
		3. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah	Kota Depok	750,000,000	-	

NO	PROGRAM	USULAN KEGIATAN	LOKASI	USULAN BIAYA		KET.
				APBD PROP. (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5		7
15.	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi	1. Peningkatan Jl. Grogol - Gandul Kec. Limo, Panjang 3000 x 5 m	Kec. Limo	3,000,000,000	3,000,000,000	
		2. Pembuatan saluran Jl. Raya Parung - Ciputat Kec.Sawangan, 1200 m	Kec. Sawangan	600,000,000	600,000,000	
		3. Peningkatan Jalan dan pembuatan saluran, Jl. Margonda Raya, Kec. Beji, 1000 m	Kec. Beji	700,000,000	3,700,000,000	
		4. Peningkatan (betonisasi) Jl. Dewi Sartika, Kec. Panmas, 660x12m	Kec. Pancoran Mas	2,000,000,000	2,000,000,000	
		5. Peningkatan (betonisasi) Jl. Bahagia - Keadilan, Kec. Sukmajaya, 1000 x 8 m	Kec. Sukmajaya	2,500,000,000	2,500,000,000	
		6. Peningkatan (betonisasi) Jl.Radar Auri, 3000 x 5 m	Kec. Cimanggis	3,000,000,000	3,000,000,000	
		7. Peningkatan Jl. Sentosa Raya, 900 x 20 m	Kec. Sukmajaya	9,000,000,000	9,000,000,000	
		8. Pemeliharaan Jl. Depok - Sawangan	Kec. Sawangan	2,700,000,000	-	
		9. Pembebasan lahan dan Pembangunan Jl. Tembus Margonda - Cinere	Kec. Beji	2,000,000,000	-	

NO	PROGRAM	USULAN KEGIATAN	LOKASI	USULAN BIAYA		KET.
				APBD PROP. (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5		7
		10. Pembangunan terminal tipe B sebagai pengganti terminal Margonda Raya	Kec. Cimanggis	9,000,000,000	-	
		11. Pemeliharaan Jl. Pekapuran	Kec. Cimanggis	-	2,700,000,000	
16.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Trafict Management pertigaan Bojong Sari - Sawangan	Kec. Sawangan	350,000,000	-	
17.	Perencanaan Pengendalian Banjir	1. Normalisasi Situ Tipar	Kec. Cimanggis	1,500,000,000	1,500,000,000	
18.	Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	1. Pengembangan Perencanaan Partisipatif	Kota Depok	250,000,000	-	
		2. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Terpadu	Kota Depok	200,000,000	-	
19.	Pemantapan Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	1. Penyusunan SPM Kewenangan Wajib Kota Depok	Kota Depok	400,000,000	-	
		2. Pemasangan Pilar Batas Wilayah Kota Depok dengan Kab. Bogor dan Kab. Bekasi	Kota Depok	600,000,000	-	
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Tertatanya Gedung dan Halaman Kantor UPPD Depok	Kota Depok	150,000,000	-	
	TOTAL USULAN	65		124,560,000,000	195,391,505,150	